

lit
B.g

LAPORAN PENELITIAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERKOTAAN DI DKI JAKARTA**

Oleh

Drs. JAMES ROBERT PUALILLIN, M. Si

Kerjasama

**MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI)
dengan
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2012**

RINGKASAN

PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program nasional dengan sasaran masyarakat miskin yang berdomisili di perkotaan. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seringkali terjadi beberapa permasalahan yang mengganggu jalannya program. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta adalah: pemetaan masyarakat miskin masih belum akurat, partisipasi masyarakat masih relatif rendah, pelaksanaan program belum menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan belum berkesinambungan, cenderung belum mampu mendorong kemandirian masyarakat, serta belum dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin. Untuk membuktikan dugaan-dugaan di atas, maka sudah sewajarnya jika pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta dievaluasi secara komprehensif, terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PNPM di lapangan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat penyebab gagal atau bahkan berhasilnya PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Dengan kata lain bisa dibuat rekomendasi pelaksanaan program sejenis untuk masa yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta.

KATA PENGANTAR

Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di DKI Jakarta sudah bukan rahasia lagi, bahkan sudah semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007, salah satunya adalah PNPM Mandiri Perkotaan dengan sasaran masyarakat miskin yang berdomisili di perkotaan. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan masalah kemiskinan dan pengangguran bisa segera diatasi melalui kemandirian masyarakat miskin tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta, terutama pelaksanaan di tingkat masyarakat. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini dapat terlihat dengan jelas sesuai realita di lokasi penelitian. Hasil evaluasi ini selanjutnya dapat memperlihatkan penyebab gagal atau bahkan berhasilnya PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Dengan kata lain bisa dibuat rekomendasi pelaksanaan program sejenis untuk masa yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tahun anggaran 2012. Oleh karena itu MIPI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran aparatur di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, para walikota, camat, dan lurah yang menjadi lokasi

penelitian, serta para responden. Harapan kami penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pelaksanaan salah satu program pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, serta dapat dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya sehingga pengentasan kemiskinan di perkotaan melalui kemandirian masyarakat dapat tercapai.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Tim Peneliti, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaannya sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Jakarta, Desember 2012
Peneliti

Drs. James Robert Pualillin, M. Si

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| RINGKASAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1. Pengertian Tes, Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi | 11 |
| 2.2. Model-Model Evaluasi | 14 |
| 2.3. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan | 17 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2. Lingkup Operasional Penelitian | 24 |
| 3.3. Responden Penelitian | 265 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian | 27 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 278 |
| 3.6. Lokasi Penelitian | 27 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 31 |
| 4.2. Pembahasan | 355 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 47 |
| 5.1. Kesimpulan | 47 |
| 5.2. Rekomendasi | 48 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA..... | 50 |
| LAMPIRAN 2 TABULASI HASIL SURVEY PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI DKI JAKARTA..... | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011-2012 (Persen) | 3 |
| Tabel 2. 1 Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan..... | 21 |
| Tabel 3. 1 Lingkup Operasional Penelitian | 25 |
| Tabel 3. 2 Pemetaan Responden | 26 |
| Tabel 3. 3 Lokasi Penelitian..... | 30 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Personil dan Tim Koordinasi Kota Provinsi DKI Jakarta..... | 31 |
| Tabel 4. 2 Jumlah Personil dan Tim Fasilitator Existing Provinsi DKI Jakarta..... | 31 |
| Tabel 4. 3 Status BKM di Provinsi DKI Jakarta | 32 |
| Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta..... | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi | 16 |
| Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan | 19 |
| Gambar 2. 3 Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Masyarakat (RW dan Kelurahan) | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA..... | 50 |
| LAMPIRAN 2 TABULASI HASIL SURVEI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI DKI JAKARTA..... | 66 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para ahli mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran merupakan prioritas utama pembangunan. Kenapa demikian? Karena problem utama yang dihadapi masyarakat dewasa ini adalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kota-kota besar. Banyak studi memperlihatkan bahwa tingkat konsentrasi penduduk di kota telah berkembang dengan pesat. Fenomena yang terjadi adalah kota-kota besar akan selalu tumbuh dan berkembang, kemudian membentuk kota yang disebut kota-kota metropolitan.

Seperti halnya Jakarta, telah lama menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan penduduk mencapai 9.607.787 jiwa pada tahun 2010 (BPS, 2010). Pada tahun 2015 diperkirakan akan menduduki tempat kelima dalam 10 besar kota-kota besar di dunia. Kondisi ini mengakibatkan perpindahan penduduk menuju kota cenderung tidak terkendali yang menghambat penyelenggaraan pembangunan (Permana, 2010).

Pada hari-hari arus balik lebaran, Jakarta banjir pendatang dari daerah. Menurut perkiraan Pemerintah DKI Jakarta, setelah lebaran penduduk DKI Jakarta bertambah sekitar 250 ribu jiwa baik untuk mencari kehidupan baru di Jakarta, maupun sebagai tempat transit menuju kota-kota lain. Kebanyakan para pendatang hanya berbekal tekad tanpa keterampilan yang memadai. Lapangan pekerjaan di Jakarta yang terbatas diperebutkan dengan ketat. Sehingga tidak mengherankan bila para pendatang ini harus tinggal di kolong jembatan dan gubuk-gubuk liar menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan.

Pendapat lain mengatakan bahwa makin besar laju perpindahan penduduk dari desa ke kota makin besar pula persentase penduduk kota yang akan jatuh di bawah kemiskinan atau dengan kata lain bahwa kota harus menampung banyak pendatang yang mengadu nasib tanpa keterampilan kerja di luar sektor tradisional (pertanian).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SD ke bawah, kenaikannya mencapai 3,00 persen yaitu dari 4,19 persen (Februari 2011) menjadi 7,20 persen (Februari 2012). Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP dan SLTA Umum kenaikannya adalah 1,90 persen dan 2,08 persen. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan dan Diploma serta Universitas mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan mengalami penurunan sebesar 3,91 persen, yaitu dari 15,31 persen pada Februari 2011 menjadi 11,44 persen pada Februari 2012. Begitu pula pada tingkat pendidikan Diploma dan Universitas, tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,91 persen, yaitu 12,88 persen pada Februari 2011 menjadi 9,97 persen pada Februari 2012. Data lengkap bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011-2012 (Persen)

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Februari 2011 | | | Februari 2012 | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| SD Ke Bawah | 5,43 | 2,71 | 4,19 | 12,19 | 0,76 | 7,20 |
| SLTP | 6,66 | 6,38 | 6,53 | 9,69 | 6,99 | 8,61 |
| SMA UMUM | 10,46 | 20,42 | 13,17 | 9,16 | 25,78 | 15,07 |
| SMA KEJURUAN | 14,75 | 16,61 | 15,35 | 10,90 | 12,44 | 11,44 |
| DIPLOMA DAN UNIVERSITAS | 8,37 | 18,30 | 12,88 | 5,78 | 15,74 | 9,97 |
| Jumlah | 9,67 | 12,71 | 10,83 | 9,34 | 12,86 | 10,72 |

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2012

Selain masalah pengangguran, masalah kemiskinan di DKI Jakarta juga merupakan persoalan utama. Dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 379.052,- per kapita sebulan, maka penduduk miskin 363,4 ribu dan tingkat kemiskinan 3,75%. Ada tiga alasan utama yang mengharuskan kemiskinan mendapatkan perhatian utama. Pertama, kemiskinan yang ekstrem menghasilkan inefisiensi ekonomi. Jumlah kemiskinan yang tinggi menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Lebih lanjut, tingkat tabungan secara keseluruhan dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan marjinal tertinggi ditemukan pada kelas menengah. Kedua, kemiskinan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketiga, kemiskinan yang ekstrem dipandang tidak adil. Kemiskinan yang ada disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural bagi kaum miskin untuk mengakses sumber-sumber kekayaan, sedangkan golongan kaya karena faktor keturunan dan aset dengan mudah mendapatkan kekayaan.

Oleh karena permasalahan kemiskinan begitu luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong

prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial.

Sebagai suatu gerakan nasional, program PNPM Mandiri merupakan peluang yang amat tepat bagi berbagai pihak untuk memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program PNPM Mandiri mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat ditentukan oleh adanya kepedulian aktif seluruh masyarakat, dukungan aparat perencana dan pelaksana yang penuh dedikasi dalam penanggulangan kemiskinan, dan peran aktif berbagai pihak baik perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun unsur masyarakat lain yang mendorong dan menunjang keberhasilan program.

Sejak tahun 2007-2009, Provinsi DKI Jakarta sudah mulai dengan tahap pemberdayaan dan pembelajaran pembangunan partisipasi. Barulah di tahun 2010-2013, Jakarta sudah siap dengan berbagai instrumen termasuk penyiapan SDM yang profesional untuk memasuki tahap kemandirian. Provinsi DKI Jakarta lebih mematangkan program yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Karena pengelolaan dana bergulir jelas tidak mudah sebab SDM harus disiapkan. Memberi dana kepada masyarakat lebih mudah, hanya pengelolaan dana tersebut yang lebih susah dilakukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan anggaran Rp 63 miliar untuk program Peningkatan Mata Pencarian Keluarga (PMPK). Tujuannya adalah untuk mengentaskan masyarakat miskin di wilayah Jakarta, dan akan disalurkan di 267 kelurahan dengan kisaran pemberian dananya berkisar antara Rp. 215 juta hingga Rp 255 juta. Dana ini sebagai upaya memandirikan masyarakat yang sudah memiliki usaha untuk bangkit perekonomian keluarganya.

PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program nasional dengan sasaran masyarakat miskin yang berdomisili di perkotaan. Khusus DKI Jakarta namanya Peningkatan Mata Pencarian Keluarga (PMPK) yang ada di tiap-tiap kelurahan. PMPK adalah serangkaian kegiatan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM agar mampu mengelola aset sumber penghidupannya untuk peningkatan mata pencaharian secara berkelanjutan. PMPK ini salah satu komponen PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada peningkatan mata pencaharian bagi warga miskin yang terhimpun dalam KSM. Program lainnya yang juga dibiayai oleh PNPM Mandiri Perkotaan DKI Jakarta adalah pembuatan drainase, jembatan, MCK, gerobak sampah, penerangan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan saluran pembuangan limbah.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seringkali terjadi beberapa permasalahan yang mengganggu jalannya program. Keluhan yang muncul adalah masih adanya masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh program ini. Kesulitan memetakan masyarakat miskin di DKI Jakarta memang menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Akurasi data tentang tingkat kemiskinan masyarakat menyebabkan pemetaan masyarakat yang perlu dibantu menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini

berakibat pada kurang tepatnya penentuan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diikutsertakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang berasal dari APBN dan APBD belum dapat meningkatkan partisipasi, kesadaran kritis, serta kemandirian masyarakat. Ada kesan bantuan selesai diberikan begitu saja tanpa program pendampingan yang jelas dari pemerintah. Sehingga tujuan program untuk mengentaskan kemiskinan masih jauh dari harapan.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan selama ini cenderung dilaksanakan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Seperti pada tahun 2010 program ini sempat terhenti karena dana tidak cair, secara otomatis beberapa target pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Masyarakat miskin sekali lagi merasa belum sepenuhnya dilibatkan, sehingga ada kesan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan eksklusif, artinya hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan.

Untuk membuktikan dugaan-dugaan di atas, maka sudah sewajarnya jika pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta dievaluasi secara komprehensif, terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PNPM di lapangan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat penyebab gagal atau bahkan berhasilnya PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Dengan kata lain bisa dibuat rekomendasi pelaksanaan program sejenis untuk masa yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta.

1.2. Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- (1) Pemetaan masyarakat miskin di DKI Jakarta masih belum akurat, pada kenyataannya belum semua masyarakat miskin DKI Jakarta mendapatkan bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan masih relatif rendah.
- (3) Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta relatif rendah.
- (4) Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta belum menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan belum berkesinambungan
- (5) Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta cenderung belum mampu mendorong kemandirian masyarakat
- (6) Manfaat PMPM Mandiri Perkotaan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin DKI Jakarta.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat berbagai keterbatasan, maka evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan difokuskan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat di lima wilayah kota administratif di Provinsi DKI

Jakarta, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

1.2.3 Rumusan Masalah

Selanjutnya dari identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta?
- (2) Bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta?
- (3) Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung apa saja dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian yang dapat memberi arah dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta
- (2) Mengidentifikasi keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta.
- (3) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan bahan pertimbangan bagi

Pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai tujuan yang sebenarnya. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dari sisi ekonomi, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di DKI Jakarta.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tes, Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Mardapi, 1999). Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Tes merupakan bagian tersempit dari evaluasi.

Pengukuran (*measurement*) dapat didefinisikan sebagai *the process by which information about the attributes or characteristics of thing are determined and differentiated* (Oriondo, 1998). Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Definisi lain menyatakan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematis untuk menyatakan keadaan individu. Dengan demikian, esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Pengukuran memiliki konsep yang lebih luas daripada tes. Kita dapat mengukur karakteristik suatu objek tanpa menggunakan tes, misalnya dengan pengamatan, skala rating, atau cara lain untuk memperoleh informasi dalam bentuk kuantitatif.

Penilaian (*assessment*) memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. *The Task Group on Assessment and Testing (TGAT)* mendeskripsikan asesmen sebagai semua cara yang digunakan untuk

menilai unjuk kerja individu atau kelompok. *Assesment* atau penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran.

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. Shinkfield (1985) menyatakan bahwa: *Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object's goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena.*

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (*National Study Committee on Evaluation*) dari *UCLA* menyatakan bahwa: *Evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, selecting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives.*

Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.

Dalam pelaksanaan evaluasi terdapat tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu: 1) penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*), 2) penyusunan design evaluasi (*designing the evaluation*), 3) pengumpulan informasi (*collecting information*), 4) analisis dan interpretasi informasi (*analyzing and interpreting*), 5) pembuatan laporan (*reporting information*), 6) pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan 7) evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi, evaluator pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan tentang hal yang akan dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi, serta adanya perencanaan untuk melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data, menganalisis dan membuat interpretasi terhadap data yang terkumpul serta membuat laporan. Selain itu, evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap evaluasi dan mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan dalam melaksanakan evaluasi secara keseluruhan.

Sedangkan tujuan evaluasi tercermin dalam kalimat berikut: *The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming.*

Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu: 1) menunjuk pada penggunaan metode penelitian, 2) menekankan pada hasil suatu program, 3) penggunaan criteria untuk dinilai, dan 4) kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

2.2. Model-Model Evaluasi

A. Logical Framework Approach)

LFA (LOGICAL FRAMEWORK APPROACH) merupakan suatu alat bantu (*tool*) yang bersifat analitis bagi para perencana atau manajer dalam:

- (i) Melakukan analisis situasional pada tahap penyiapan program
- (ii) Menetapkan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai
- (iii) Mengidentifikasi potensi resiko upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan
- (iv) Menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil proyek dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik

- (v) Menyajikan rangkuman proyek dalam format yang standar, dan
- (vi) Memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan proyek.

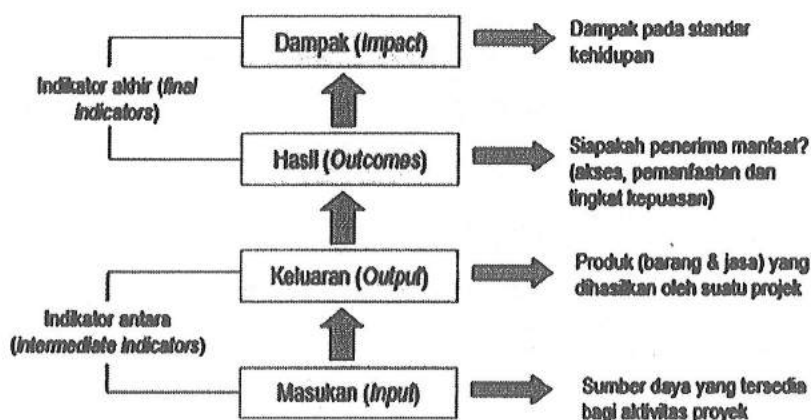
Dengan kata lain, *LFA* mencakup analisis masalah (*problem analysis*), analisis pemangku kepentingan (*stakeholders analysis*), pengembangan suatu hirarki logis dari objektif (*objective analysis*), identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan pemilihan strategi implementasi yang diunggulkan. Hasil pendekatan analitis ini berupa suatu matriks yang biasa disebut matriks kerangka kerja logis (*logical framework matrix – LFM*). Matriks ini merupakan rangkuman apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, asumsi-asumsi yang digunakan, dan bagaimana keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi.

LFA pada umumnya terdiri atas empat elemen utama, yaitu:

- (i) Masukan (*inputs*)
- (ii) Keluaran (*outputs*)
- (iii) Hasil (*outcomes*), dan
- (iv) Dampak (*impact*)

Secara hirarki, keempat elemen dari kerangka kerja konseptual tersebut di atas digambarkan dalam Gambar 2.1 berikut ini. Masukan (*input*) berupa sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, dan sarana-sarana fisik lainnya, merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keluaran (*output*) berupa barang dan jasa. Untuk melihat kecukupan masukan dan volume hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diperlukan ukuran, yaitu indikator, yang pada kedua tahapan/fase ini menggunakan indikator antara (*intermediate indicator*). Dari rangkaian proses tersebut,

selanjutnya diperoleh hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) yang pada umumnya baru dapat dilihat setelah kurun waktu tertentu tergantung dari jenis proyek. Untuk mengukur dua elemen terakhir tersebut digunakan indikator akhir (*final indicator*).



Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi

B. Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*)

Pemakaian model *CIPP* didasari oleh pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi model *CIPP* dapat diterapkan dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi.

Berikut penjabaran dari empat dimensi dalam model *CIPP*:

- 1) *Context*: situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi program yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan.
- 2) *Input*: sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan program.

- 3) *Process*: pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal/bahan dalam kegiatan nyata di lapangan.
- 4) *Product*: hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem yang bersangkutan.

2.3. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Untuk menyelenggarakan PNPM Mandiri Perkotaan ini maka Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (*executing agency*) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan program ini.

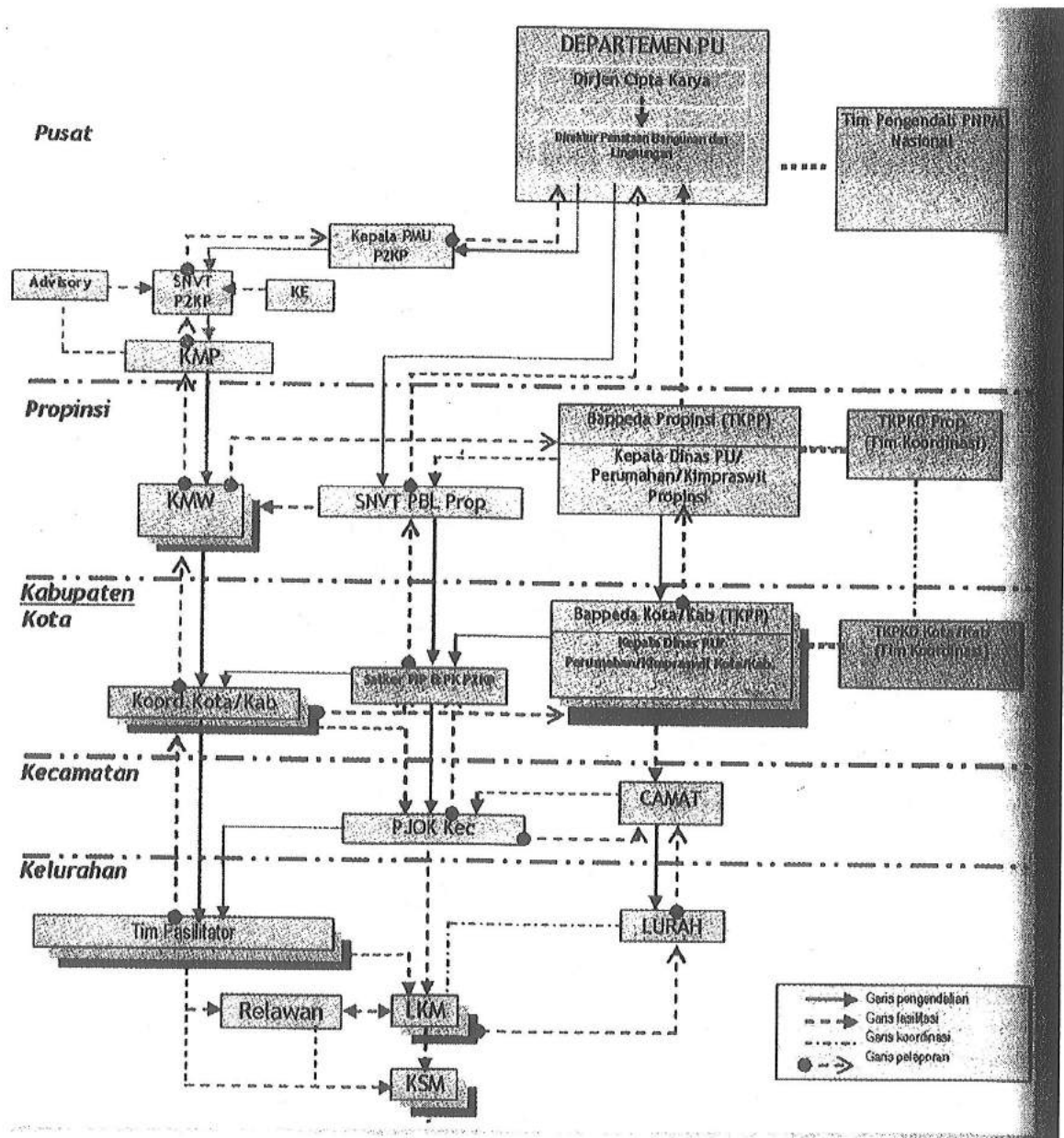
Direktorat Cipta Karya kemudian membentuk Unit Manajemen Proyek atau lebih dikenal sebagai *PMU (Project Management Unit)* yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan mendapat mandate penuh serta bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM-MP.

Untuk pelaksanaan di lapangan, *PMU* melalui Satker mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama *PMU* sesuai dengan kewenangan yang diberikan *PMU*, untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh termasuk manajemen Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di beberapa provinsi yang membawahi beberapa *Team Leader* sesuai jumlah provinsi

dampingannya, dipimpin oleh seorang *Program Director*. Begitu juga untuk di tiap kota dan kabupaten akan dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Di tingkat kelurahan, tiap tujuh sampai dengan 10 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator. Tim Fasilitator ini akan dikontrak oleh Satker Provinsi yang dalam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Korkot. Di samping itu di tiap kelurahan, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan (sekurang-kurangnya 30 orang/kelurahan). Para relawan ini melalui suatu pelatihan secara khusus oleh KMW akan menjadi Kader Masyarakat PNPM-MP yang akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja bersama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Secara rinci hubungan kerja antar unsure pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu: "Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri". Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut: "Masyarakat di kelurahan

peserta program menikmati perbaikan sosial, ekonomi, dan tata pemerintahan lokal”.

Sedangkan sasaran PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
- b. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
- c. Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah.
- d. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Kelompok Sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan

| Uraian Kelompok Sasaran | Bantuan Teknik/Pendampingan | Bantuan Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat warga kelurahan peserta PNPM Mandiri Perkotaan, • LKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat • KSM/Kelompok Swadaya Masyarakat | Warga kelurahan yang miskin menurut kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah lama miskin, yang penghasilannya menjadi tidak berarti karena inflasi, yang kehilangan sumber penghasilannya |
| Pemerintah Kota/Kabupaten, TKPP, dan TKPK Daerah | Perangkat pemerintahan kota /kabupaten s/d kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, anggota TKPP dan TKPK Daerah | |
| Para Pemangku Kepentingan terkait | Perorangan atau asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM, Bank, notaris, auditor publik, media massa (radio, tv) yang peduli dengan kemiskinan | |

2.4. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

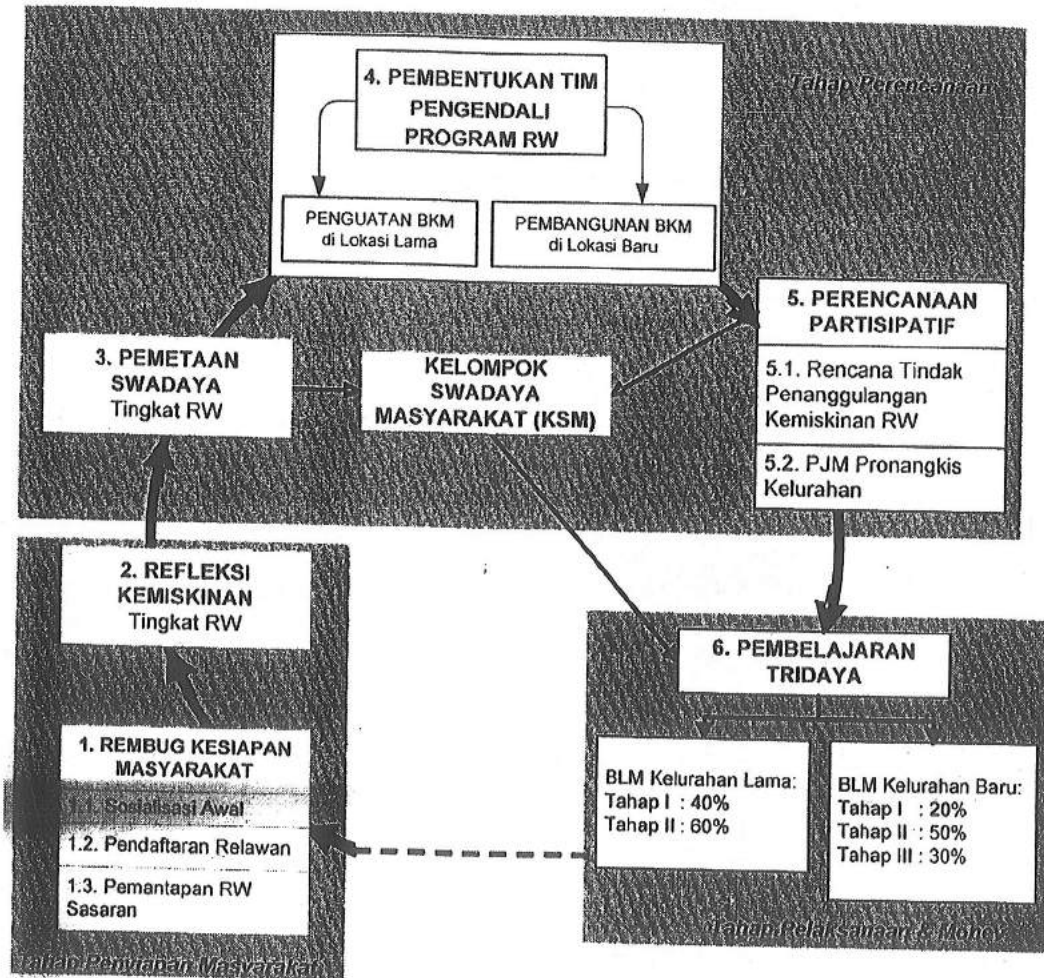
Pola pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan untuk Provinsi DKI Jakarta secara umum mengacu pada buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan tambahan:

- (1) Pedoman Teknis Pembentukan Tim Pengendali Program;
- (2) Pedoman Teknis Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan.

Terkait dengan sasaran penerima manfaat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fokus pendampingan hanya dilakukan di kantong-kantong RW miskin: artinya fasilitasi intensif oleh fasilitator PNPM hanya akan diberikan kepada maksimum lima RW termiskin di kelurahan sasaran yang ditetapkan melalui musyawarah kelurahan.

- b. Untuk RW-RW di dalam kelurahan sasaran yang bersangkutan namun bukan merupakan RW termiskin yang ditetapkan, maka P2KP akan memberikan pendampingan oleh fasilitator apabila ada kesediaan Pemprov DKI menyediakan dana BLM untuk mendanai proyek/kegiatan masyarakat sesuai dengan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan RW dan PJM Pronangkis Kelurahan.
 - c. Penerima manfaat langsung dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan adalah warga miskin sesuai kriteria yang disepakati masyarakat dalam kajian Pemetaan Swadaya di RW termiskin yang ditetapkan.
- Gambaran umum mengenai tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2. 3 Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Masyarakat (RW dan Kelurahan)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari sisi *context*, *input*, *process*, dan *product*.

3.2. Lingkup Operasional Penelitian

Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan difokuskan pada tahapan kegiatan di tingkat masyarakat (RW dan Kelurahan). Sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model *CIPP* (*Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*), dengan alasan model ini sesuai digunakan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan tanpa menunggu program selesai dilaksanakan. Pelaksanaan setiap tahapan ditanyakan kepada responden, sehingga tergambar hasilnya dari sisi *CIPP*.

Supaya dapat dilakukan pengumpulan data di lapangan, selanjutnya definisi konsep di atas dioperasionalkan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Lingkup Operasional Penelitian

| Konsep | Dimensi | Indikator |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta | 1. <i>Context</i> | Latar belakang dan tujuan setiap tahapan kegiatan |
| | 2. <i>Input</i> | Sumber-sumber yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Buku-buku pedoman - Masyarakat miskin - Anggaran - Pengelola |
| | 3. <i>Process</i> | Pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Rembug Kesiapan Masyarakat - Tahap Pendaftaran Relawan - Tahap Refleksi Kemiskinan - Tahap Pemetaan Swadaya - Tahap Pembentukan Tim Pengendali Program RW - Tahap Penguatan BKM - Tahap Perencanaan Partisipatif RW - Tahap Perencanaan Partisipatif Kelurahan - Tahap Musrenbang Kelurahan |
| | 4. <i>Product</i> | Hasil dari setiap tahapan kegiatan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan - Partisipasi masyarakat, termasuk perempuan - Kesepakatan-kesepakatan - Relawan yang terjaring - Anggota BKM yang terpilih - Surat permintaan bantuan teknik ke Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Bappekot (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) - Data masyarakat miskin - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) - Visi, Misi, Tujuan, dan Aturan Kelompok - Anggota Tim Pengendali Program RW - AD/ART BKM - Anggota Tim Perencanaan Partisipatif RW - Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (RTPK) RW - Rencana Program Tahunan - Anggota Tim Perencanaan Partisipatif Kelurahan - Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) |

3.3. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3. 2 Pemetaan Responden

| Tahap | Responden 1 | Responden 2 | Responden 3 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rembug Kesiapan Masyarakat | 1. Lurah 2. Fasilitator | 1. Ketua RR 2. Ketua RT 3. Tokoh Masyarakat 4. Perwakilan Organisasi Masyarakat 5. Perwakilan Warga 6. Perangkat Kelurahan 7. Dewan Kelurahan | |
| Penentuan Relawan | 1. Perangkat Kelurahan 2. Fasilitator | 1. Perwakilan Warga 2. Perwakilan Warga Perempuan | 3. Relawan |
| Refleksi Kemiskinan | 1. Perangkat Kelurahan 2. Relawan (Tim Refleksi Kemiskinan) 3. Fasilitator | | |
| Pemetaan Swadaya | 1. Lurah 2. Fasilitator | Tim Pemetaan Swadaya | Kelompok Swadaya Masyarakat |
| Pembentukan Tim Pengendali Program | 1. Relawan 2. Fasilitator 3. Perangkat RW | Perwakilan Warga | Tim Pengendali Program RW |
| Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) | 1. Lurah 2. Relawan 3. Fasilitator 4. Perangkat Kelurahan (LPM) 5. Dewan Kelurahan | Tim Pengendali Program RW | Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) |

Tabel 3.2 (Lanjutan)

| Tahap | Responden 1 | Responden 2 | Responden 3 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Perencanaan Partisipatif RW | 1. Fasilitator 2. Ketua RW | 1. Perwakilan Warga 2. Perwakilan Warga Perempuan 3. Perangkat RW | Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW |
| Perencanaan Partisipatif Kelurahan | 1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 2. Lurah | 1. Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW 2. Perwakilan Warga 3. Perwakilan Warga Perempuan 4. Perangkat Kelurahan | Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan |
| Musrenbang Kelurahan | 1. Lurah 2. Dewan Kelurahan 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 4. Fasilitator | 1. Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW 2. Perwakilan Warga 3. Perwakilan Warga Perempuan 4. Perangkat Kelurahan | |

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Wawancara; dilakukan secara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden guna mengetahui tahapan pelaksanaan PNPM-MP di lapangan.
- (2) Studi Kepustakaan (Dokumentasi); dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan bacaan berbagai buku, teori,

jurnal, makalah ilmiah, dokumen, termasuk berbagai peraturan dan bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan yang berkaitan dengan penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan melalui data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik bersumber dari dokumentasi maupun buku, koran, majalah mengenai pendapat, dan hukum yang berhubungan dengan konsep dasar tentang pembangunan masyarakat dan, partisipasi masyarakat. Studi dokumentasi diharapkan memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data, maka peneliti disebut sebagai instrumen penelitian, yang didukung oleh alat bantu seperti alat tulis, *tape recorder*, kamera, serta peta. Pedoman wawancara secara lengkap bisa dilihat pada Lampiran 1.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

(1) Pemrosesan Satuan

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu berupa data hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan arsip dengan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Selanjutnya, dari masing-masing data yang telah ditelaah dari masing-masing sumber itu dibuat abstraksi berupa rangkuman inti.

(2) Kategorisasi

Data dikelompokkan atas dasar pikiran, intuisi, dan pendapat. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing. Metode yang digunakan dalam analisis adalah mengkomparasikan data yang diperoleh dari responden dan dokumentasi.

Form tabulasi data bisa dilihat pada Lampiran 2.

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lima wilayah kota administratif di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Ada pun pemilihan kelurahan sebagai objek penelitian didasarkan pada kelurahan yang mempunyai BKM dengan kinerja sangat baik, memadai, dan tidak memadai. Lokasi penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 3 Lokasi Penelitian

| Kota | Kecamatan | Kelurahan |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Jakarta Utara | Cilincing | Sukapura |
| | | Cilincing |
| Jakarta Timur | Pasar Rebo | Kalisari |
| | Cipayung | Pondok Ranggong |
| | Jatinegara | Cipinang Muara |
| Jakarta Selatan | Pasanggrahan | Ulujami |
| | Pasar Minggu | Ragunan |
| | Cilandak | Pondok Labu |
| Jakarta Barat | Tambora | Rawa Malaka |
| | Tamansari | Krukut |
| | | Mangga Besar |
| | Cengkareng | Kali Angke |
| | | Kapuk |
| Jakarta Pusat | Sawah Besar | Karang Anyar |
| | Kemayoran | Gunung Sahari Selatan |
| | Menteng | Pegangsaan |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 4.1 sampai dengan 4.3 berturut-turut menunjukkan jumlah personil dan tim koordinasi kota Provinsi DKI Jakarta, jumlah personil dan tim fasilitator existing Provinsi DKI Jakarta, serta status BKM di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4. 1 Jumlah Personil dan Tim Koordinasi Kota Provinsi DKI Jakarta

| No | Kota/Kab Adm. | KORK OT | ASKOT CD | ASKOT MK | ASKOT INFRA | ASKOT DATA | TOTAL |
|----|------------------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 1. | Jakarta Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Jakarta Utara | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 3. | Jakarta Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Jakarta Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Jakarta Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6. | Kepulauan Seribu | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | DKI Jakarta | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 |

Tabel 4. 2 Jumlah Personil dan Tim Fasilitator Existing Provinsi DKI Jakarta

| No. | Kota/Kab Adm. | Kel. | Tim | SF | CD | EKO | TEK | TOT |
|-----|------------------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 1. | Jakarta Pusat | 44 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 26 |
| 2. | Jakarta Utara | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 3. | Jakarta Barat | 56 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 29 |
| 4. | Jakarta Selatan | 65 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | 35 |
| 5. | Jakarta Timur | 65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 |
| 6. | Kepulauan Seribu | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | DKI Jakarta | 267 | 32 | 32 | 37 | 32 | 48 | 149 |

Sedangkan Tabel 4.4 memperlihatkan hasil evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan model *CIPP*.

Tabel 4. 3 Status BKM di Provinsi DKI Jakarta

| Kota/Kab. | Jumlah BKM | BKM yang masih mengelola dana bergulir | Status BKM berdasarkan kinerja kesekretariatan | | |
|------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| | | | Sangat Baik | Memadai | Tidak Memadai |
| Jakarta Barat | 56 | 3 | 5 | 49 | 2 |
| Jakarta Pusat | 44 | 3 | 2 | 41 | 1 |
| Jakarta Selatan | 65 | 8 | 4 | 53 | 7 |
| Jakarta Timur | 65 | 4 | 10 | 51 | 3 |
| Jakarta Utara | 31 | 3 | 2 | 29 | |
| Kepulauan Seribu | 6 | | | | |
| Jumlah | 267 | 21 | 23 | 229 | 13 |

Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

| Tahapan Program | Context | Input | Process | Product |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rembug Kesiapan Masyarakat | Tujuan: untuk menyatakan kesiapan warga melaksanakan PNPM-MP; belum sepenuhnya tercapai, masyarakat masih ragu bahwa PNPM-MP untuk masyarakat miskin | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap; tetapi belum sepenuhnya dipedomani - Peserta; keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan PNPM MP sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lokasi - Keterlibatan perangkat kelurahan bervariasi tergantung lokasi, ada kecenderungan masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> - Secara prosedural rembug kesiapan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman - Pembuatan surat permohonan bantuan teknik lebih banyak inisiatif fasilitator, masyarakat belum sepenuhnya merasa terlibat, masih bersifat pasif | Surat permohonan bantuan teknik ke KMW dan Bappekot; belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat masih rendah |

Tabel 4.4 (Lanjutan)

| Tahapan Program | Context | Input | Process | Product |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penentuan Relawan | Tujuan: memperoleh relawan yang melibatkan perempuan minimal 30%; ada yang berhasil dan ada pula yang belum | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah ada - Masyarakat belum sepenuhnya bersedia mencalonkan diri sebagai relawan, cenderung ditunjuk - Peran fasilitator sangat dominan | Proses cenderung langsung menunjuk, belum sesuai prosedur dan kriteria yang seharusnya | Terpilihnya relawan; pada lokasi tertentu keterwakilan perempuan sangat tinggi (di atas 80%), lokasi lain sangat rendah (di bawah 30%), secara keseluruhan masih rendah |
| Refleksi Kemiskinan | Tujuan: memetakan masyarakat miskin; bersifat subjektif tergantung pada definisi kemiskinan yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Tim Refleksi Kemiskinan belum sepenuhnya memahami tupoksinya - Data masyarakat miskin kurang lengkap dan kurang akurat | Tim Refleksi Kemiskinan cenderung langsung memetakan kemiskinan tanpa klarifikasi data kemiskinan yang ada | Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan; kadang masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat miskin |
| Pemetaan Swadaya | Tujuan: mengidentifikasi potensi dan membentuk KSM rata-rata sudah tercapai dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator cukup dominan - Keterlibatan masyarakat masih rendah - Pagu anggaran kurang realistis | Proses pemetaan swadaya masih belum mencerminkan potensi yang sebenarnya | Terbentuknya KSM; masih berasal dari kelompok masyarakat yang sama dengan relawan dan Tim Refleksi Kemiskinan |

Tabel 4.4 (Lanjutan)

| Tahapan Program | Context | Input | Process | Product |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembentukan Tim Pengendali Program | Tujuan: membentuk TPP yang diambil dari para relawan; rata-rata sudah tercapai dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator cukup dominan - Keterlibatan masyarakat masih rendah | Proses pembentukan Tim Pengendali Program langsung dilakukan melalui penunjukan | Terbentuknya TPP; masih berasal dari kelompok masyarakat yang sama dengan relawan dan Tim Refleksi Kemiskinan |
| Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) | Tujuan: memilih anggota BKM yang baru; rata-rata sudah tercapai dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Kehadiran TPP RW cukup baik - Fasilitator tetap dominan | Proses sudah sesuai prosedur | Terpilihnya anggota BKM; diambil dari TPP RW |
| Perencanaan Partisipatif RW | Tujuan: menyusun RTPK; rata-rata sudah tercapai | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Keterlibatan masyarakat miskin masih rendah | Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah | Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya |
| Perencanaan Partisipatif Kelurahan | Tujuan: menyusun PJM Pronangkis; rata-rata sudah tercapai | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Keterlibatan masyarakat miskin masih rendah | Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah | PJM Pronangkis; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya |
| Musrenbang Kelurahan | Tujuan: koordinasi supaya PJM Pronangkis diakui sebagai program kelurahan; rata-rata sudah tercapai | <ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Keterlibatan masyarakat miskin masih rendah | Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator dan kelurahan cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah | PJM Pronangkis sebagai program kelurahan; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya |

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat secara prosedural rata-rata sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah dan persyaratan secara normatif juga sudah terpenuhi. Jadi dilihat dari konteksnya, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara umum dapat tercapai. Beberapa hal yang tingkat pencapaiannya masih relatif rendah adalah: pemahaman masyarakat miskin tentang PNPM MP masih perlu ditingkatkan lagi, mereka masih meragukan bahwa PNPM MP mampu mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pun masih diragukan. Kesulitan lain adalah pemetaan masyarakat miskin yang akan dibantu oleh PNPM-MP belum sepenuhnya mencapai sasaran, sehingga berpengaruh pada penentuan KSM sebagai target PNPM-MP juga menjadi kurang tepat.

Tentu saja kelemahan di atas tidak lepas dari kurangnya peran masyarakat miskin dalam tahapan pelaksanaan PNPM-MP. Walaupun secara normatif sudah tersedia buku pedoman yang lengkap, tetapi pada prakteknya bukanlah hal yang mudah untuk menggerakkan masyarakat supaya terlibat aktif dalam pelaksanaan PNPM-MP. Tentu banyak faktor penyebabnya, tetapi penyebab utama yang ditemukan di lapangan adalah ketidakpercayaan masyarakat akan keberhasilan PNPM-MP serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah membuat mereka lebih susah untuk dimotivasi. Di samping itu pagu anggaran yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri masih kurang, sehingga masyarakat miskin yang bisa tersentuh oleh program ini relatif sedikit.

Seperti sudah dijabarkan di atas, bahwa proses pelaksanaan sesuai tahapan PNPM-MP sudah berjalan dengan baik. Hal ini tidak

lepas dari peran fasilitator yang dominan, dan pada dasarnya ada target-target yang harus dicapai oleh fasilitator tersebut. Ada dampak negatif dari keharusan target tercapai yaitu munculnya fenomena yang penting pekerjaan selesai, tanpa memperhatikan esensi dari program tersebut. Proses pendampingan untuk kemandirian masyarakat masih perlu dicari polanya, karena dominasi peran fasilitator membuat pemberdayaan masyarakat yang diinginkan sesuai tujuan PNPM-MP hanya menjadi angan-angan belaka.

Adanya target yang harus dicapai dalam setiap tahapan pelaksanaan PNPM-MP menimbulkan hal positif, yaitu setiap tahapan dapat menghasilkan produk yang secara kuantitas dapat terpenuhi, tetapi secara kualitas masih perlu ditinjau kembali. Sebut saja surat permohonan bantuan teknik ke KMW dan Bappekot, Rencana Tindak Pengentasan Kemiskinan (RTPK), serta PJM Pronangkis masih belum mencerminkan kebutuhan real masyarakat miskin di DKI Jakarta. PJM Pronangkis seolah-olah didesakkan hanya untuk kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan, belum menyentuh hal-hal mendasar di masyarakat miskin. Keberadaan PJM Pronangkis yang lemah legalitasnya walaupun berhasil didudukkan sebagai salah satu perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah, secara hukum sangat ambigu dalam konstelasi perencanaan daerah.

4.2.2. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM-MP belum sepenuhnya tercapai. Artinya masih ada pihak-pihak yang berperan pasif, sehingga kontribusinya terhadap keberhasilan PNPM-MP

menjadi kecil. Berikut ini dijabarkan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM-MP di DKI Jakarta.

1. **Lurah;** terlibat aktif dalam pelaksanaan PNPM-MP, bersama-sama dengan masyarakat membuat kesepakatan yang pada dasarnya menyetujui dan mendukung kehadiran pelaksanaan PNPM MP di DKI Jakarta.
2. **Perangkat Kelurahan dan Dewan Kelurahan;** lebih banyak berperan aktif dalam musrenbang kelurahan setelah PJM Pronangkis akan diusulkan menjadi program kelurahan.
3. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan dan aturan main secara demokratis mengenai hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis.
- c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan keputusan yang diambil.
- d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh unit pengelola.
- e. Mengawal terlembaganya nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan
- f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g. Membangun kerjasama dengan pihak luar.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai penggerak dan pengendali pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan untuk penanggulangan kemiskinan berjalan. Dalam menjalankan kebijakannya LPM dibantu oleh Unit Pengelola (UP), sehingga LPM lebih fokus didalam membuat kebijakan dan memonitoring segala kegiatan. Unit Pengelola bertanggungjawab penuh kepada LPM.

Kelebihan LPM dalam membangun modal sosial yakni; (1) membangun kerjasama dan kepercayaan diantara anggota LPM, (2) menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara LPM dan masyarakat, (3) Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat; (4) menumbuhkan kerjasama antara LPM dengan pihak luar (kemitraan).

Pengamatan di lapangan menunjukkan masih ada LPM yang tidak melaksanakan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya untuk mendorong terjadinya perubahan sosial di komunitasnya, LPM memperkuat kelembagaannya, tanpa penguatan sumber daya manusianya, maka keberadaan LPM yang sesungguhnya merupakan mandat komunitas menjadi lemah.

4. Fasilitator

Fasilitator kelurahan atau faskel adalah tenaga pengembang masyarakat yang mendampingi masyarakat dalam membangun keberdayaannya. Ada faskel teknik, faskel ekonomi, faskel CD (*community development*), dan ada faskel senior sebagai koordinator dalam tim faskel di setiap kelurahan. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta faskel senior bertempat tinggal dekat dengan warga sehingga terjalin kebersamaan, dan proses saling belajar mengenai permasalahan dan persoalan yang dihadapi, akan tetapi pada kenyataan fasilitator kelurahan masih bertempat tinggal jauh dengan

warga kelurahan, sehingga program pendampingan menjadi kurang efektif. Faskel-faskel ini tidak selamanya mendampingi masyarakat. Manakala kondisi kemandirian masyarakat telah tercapai, faskel tidak diperlukan lagi, perannya digantikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam memelihara keswadayaan masyarakat lokal.

5. Ketua Rukun Warga dan Perangkat RW

Terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang secara spesifik fokus pada sasaran kawasan padat, kumuh dan miskin (Pakumis).

6. Masyarakat; partisipasi masih relatif rendah, penyebabnya antara lain:

- a. Belum terjadinya perubahan pola pikir dari masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, karena selama ini masyarakat bukan menjadi subjek dari program dari pemerintah, yang mana masyarakat selama ini terpola dalam pikiran untuk mementingkan materi.
- b. Waktu proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung singkat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan memakai batas waktu pengerjaan dalam setiap siklusnya. Padahal dalam pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Padahal pemberdayaan menyatu di masyarakat yang menjadi keinginan masyarakat di lingkungannya.

7. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta Barat tugas pokok dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang peduli, memiliki komitmen kuat, jujur, ikhlas, tanpa pamrih dan mau

berkorban untuk masyarakat miskin, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya menerapkan pola kepemimpinan kolektif, dan secara terstruktur membangun keswadayaan masyarakat hingga ke kelompok terkecil. Peran tersebut secara garis besar belum dilaksanakan secara maksimal, terlihat dari kinerja BKM dengan kategori sangat baik masih di bawah 10%.

8. Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW dan Kelurahan

Terlibat aktif dalam proses perencanaan partisipatif, tetapi masih didampingi oleh fasilitator. Jadi kemandiriannya masih kurang.

9. Tim Pemetaan Swadaya

Terlibat aktif dalam proses penentuan Kelompok Swadaya Masyarakat, tetapi masih didampingi oleh fasilitator. Jadi kemandiriannya masih kurang.

10. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok swadaya masyarakat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di DKI Jakarta dalam penanggulangan kemiskinan memanfaatkan sebagian dana BLM (bantuan langsung masyarakat) untuk kegiatan jalan rabat beton, jalan paving block, jalan hotmix, saluran air hujan terbuka (batu kali, bata, buis beton), saluran air hujan tertutup (buis beton, pipa PVC), plat penutup saluran, plat duiker, jembatan beton/batu, penerangan jalan umum (PJU), gerobak sampah, MCK (Mandi + Cuci + Kakus), perbaikan rumah tidak layak huni, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan bangunan Posyandu yang dilaksanakan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan tujuan untuk

meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan menumbuhkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab dan rasa kebersamaan.

Program yang dilaksanakan masih banyak berorientasi pada pembangunan fisik, baru pada tahun 2013 mendatang ada pergeseran paradigma ke arah potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing kelurahan. Pergeseran paradigma ini dengan tujuan PNPM-MP bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh PNPM-MP dapat menumbuhkan pengusaha lokal yang baru. Tujuannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, sehingga PNPM-MP yang direncanakan di tingkat kelurahan benar-benar mengarah kepada pengentasan kemiskinan. Selain itu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan pelatihan yang dibutuhkan, misalnya pelatihan usaha ekonomi produktif dan lainnya.

11. Tim Pengendali Program Rukun Warga

Tugas pokok dan fungsi tim pengendali program Rukun Warga dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah rukun warga dengan melakukan pendekatan pribadi kepada masyarakat pentingnya keterlibatan warga dilaksanakan tim pengendalian program rukun warga untuk mendorong terlibat dalam kegiatan forum rukun warga bersifat dialogis.

Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian

besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembung dalam menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

12. Relawan

Tugas pokok dan fungsi relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan "manajemen relawan" melalui: perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring aktivitas kerelawanan secara terbuka dan bertanggung jawab (prinsipnya: transparansi dan akuntabilitas). Sehingga fungsi relawan dengan segala bentuk bantuan yang diberikan secara sukarela untuk menolong orang lain dan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran tenaga, bakat termasuk kemampuan intelektualitas, harta. dan keahlian serta sadar bahwa tidak mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan.

Untuk menjadi relawan aktivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmen menumbuhkan PNPM MP yang secara ikhlas sebagai panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya tanpa

mengharapkan imbalan/upah. Pada kenyataan di wilayah DKI Jakarta peran relawan masih kurang terlihat.

Akan tetapi ada juga relawan diikuti oleh motivasi pribadi yang lain, misalnya keinginan untuk memperoleh pengalaman baru, mendapatkan teman baru, mendapatkan perspektif baru, menggali potensi atau sekedar untuk mengisi waktu luang dan saling belajar dalam memahami isu yang diminati secara lebih kritis, serta melakukan aksi nyata dalam keterlibatannya di berbagai kegiatan.

Gambaran relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Para relawan perorangan atau individu yang tidak dikoordinir oleh lembaga RT, RW, Badan Kewasdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kelurahan dan Kepala Kelurahan, aktivitas relawan banyak berlangsung di masyarakat, akan tetapi sulit untuk diukur, karena dianggap sebagai kegiatan rutin harian.
2. Para relawan yang dikoordinir oleh kelompok lembaga RT, RW, Badan Kewasdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kelurahan dan Kepala Kelurahan, atau perusahaan tertentu, Hal ini bersifat insidental atau dilakukan secara tidak berkelanjutan. Misalnya, kegiatan bakti sosial, pos yandu, wirid yasin dalam rangka ulang tahun lembaga atau perusahaan.
3. Para relawan yang dikelola kelompok lembaga RT, RW, Badan Kewasdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kelurahan dan Kepala Kelurahan, secara profesional dan berkelanjutan atau secara terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan

adanya komitmen yang kuat dari relawan (baik tertulis maupun lisan) untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan, adanya aktivitas yang rutin dan adanya lembaga RT, RW, Badan Kewasdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kelurahan dan Kepala Kelurahan yang khusus merekrut dan mengelola para relawan secara profesional.

4.2.3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Dari evaluasi yang cukup menyeluruh pada bagian sebelumnya, berikut ditemukan beberapa faktor penghambat yang dapat memperlambat keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta, yaitu:

- Partisipasi masyarakat masih rendah, terlihat dari peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan hampir tidak ada. Hal ini berakibat pula pada kesulitan memotivasi masyarakat miskin untuk ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat miskin masih menjadi objek dan belum mempunyai kemandirian untuk mengubah masa depannya.
- Peran fasilitator terlalu dominan, sehingga ada kesan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan masih bersifat *top down*. Hal ini juga yang menyebabkan kemandirian masyarakat kurang.
- Buku pedoman hanya sebagai landasan normatif, dalam pelaksanaan lebih banyak mengejar target penyelesaian pekerjaan. Memang secara prosedural program terlaksana dengan

baik, tetapi jika ditelusuri hasilnya, maka terlihat bahwa kemandirian masyarakat masih jauh dari harapan.

- Kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya PNPM Mandiri Perkotaan masih rendah. Mereka belum yakin bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah untuk masyarakat miskin. Masih ada anggapan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan hanya sebatas proyek untuk memperoleh keuntungan pihak-pihak tertentu. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat miskin untuk mulai belajar memahami pentingnya PNPM Mandiri Perkotaan juga menjadi penyebab mereka tidak mau terlibat aktif.
- Masih banyak program yang berorientasi fisik, sehingga manfaat PNPM Mandiri Perkotaan masih dirasakan oleh pihak lain di luar masyarakat miskin, seperti pembangunan drainase, gorong-gorong, jembatan atau gedung fasilitas umum lainnya. Hal ini menyebabkan keraguan masyarakat miskin akan pentingnya PNPM Mandiri Perkotaan semakin tinggi.
- Pagu anggaran pemerintah untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan kurang realistis, sehingga cakupan masyarakat miskin yang dapat dibantu menjadi sedikit.

Di samping faktor-faktor penghambat di atas, ditemukan juga beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut:

- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah DKI Jakarta yang cukup membantu pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

- Kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sangat membantu pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, walaupun pemakaiannya masih terbatas.
- Tersedianya lembaga kepemimpinan masyarakat yang memudahkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan. Beberapa contoh kepemimpinan masyarakat bisa dilihat dari adanya tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga setempat.
- Tersedianya potensi swadaya masyarakat di lingkungan wilayah PNPM Mandiri Perkotaan, walaupun belum tergali secara maksimal, bisa digunakan sebagai sumber kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin setempat.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara prosedural PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dari sisi kemandirian masyarakat miskin masih belum sepenuhnya tercapai. Peran fasilitator masih terlalu dominan, sehingga kesan top down terhadap pelaksanaan program masih terlihat dengan jelas.
2. Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta sudah cukup baik. Keterlibatan yang masih perlu ditingkatkan adalah masyarakat secara umum, serta masyarakat miskin itu sendiri. Perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya PNPM Mandiri Perkotaan diterapkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Masyarakat miskin harus diberi keyakinan yang sebesar-besarnya.
3. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta, diantaranya adalah: partisipasi masyarakat masih rendah, peran fasilitator terlalu dominan, buku pedoman hanya sebagai landasan normatif, masih banyak program yang berorientasi fisik, kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya PNPM Mandiri Perkotaan masih rendah, serta pagu anggaran yang kurang realistis. Sedangkan faktor-faktor pendukung diantaranya adalah: adanya dukungan anggaran dari Pemerintah DKI Jakarta, tersedianya buku pedoman, tersedianya

kepemimpinan masyarakat, serta tersedianya potensi di lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang telah dikemukakan di atas, maka perlu upaya-upaya yang diduga dapat meningkatkan keberhasilan Mandiri Perkotaan. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah:

- Meningkatkan kesadaran tokoh masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan, dengan cara pelibatan maksimal melalui pendekatan yang lebih persuasif.
- Meningkatkan kesadaran tokoh masyarakat untuk bersedia menjadi relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
- Mengupayakan kesinambungan dukungan anggaran dari Pemerintah DKI Jakarta untuk program-program pemberdayaan yang sinergis dengan PNPM Mandiri Perkotaan.
- Menggali secara intensif potensi swadaya di lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai sumber kegiatan ekonomi bagi masyarakat miskin setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2007):
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – Perkotaan.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2011):
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – Perkotaan 2011 Khusus
Provinsi DKI Jakarta.
- Mardapi, D. (2000). Evaluasi Pendidikan. Makalah disampaikan pada
Konvensi Pendidikan Nasional tanggal 19-23 September 2000 di
Universitas Negeri Jakarta.
- Oriondo, L.L. & Antonio, E. M.D. (1998). *Evaluating educational
outcomes (Test, measurement and evaluation)*, Florentino St: Rex
Printing Company, Inc.
- Permana, E. (2010). Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi
Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan
Pancoranmas Depok), Tesis, tidak dipublikasikan, Fakultas
Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas
Indonesia.
- Sari, L.P. (2009): Studi Evaluasi Keberhasilan Program Bebenah
Kampung Berdasarkan Penilaian Masyarakat (Penilaian dari Aspek
Fisik, Sosial, dan Ekonomi), Skripsi, tidak dipublikasikan, Jurusan
Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas
Indonusa Esa Unggul.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation*.
Boston: Kluwer Nijhof Publishing.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

TAHAP REMBUG KESIAPAN MASYARAKAT

RESPONDEN:

- KETUA RW
- KETUA RT
- TOKOH MASYARAKAT
- PERWAKILAN ORGANISASI MASYARAKAT
- PERWAKILAN WARGA
- PERANGKAT KELURAHAN
- DEWAN KELURAHAN

PERTANYAAN:

1. Apakah bapak/ibu paham tentang tujuan PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawaban: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan yang bapak/ibu ketahui
2. Apakah bapak/ibu paham tentang proses PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawaban: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan proses PNPM Mandiri Perkotaan yang bapak/ibu ketahui
3. Apakah bapak/ibu waktu mengikuti Rembug Kesiapan Masyarakat menyetujui atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawaban: Menyetujui atau Menolak
Sebutkan alasan menyetujui atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil:
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
7. Apakah penyelenggaraan Rembug Kesiapan Masyarakat dari sisi penyelenggaraan sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan alasannya:

8. Apakah bapak/ibu terlibat dalam pembuatan surat permintaan bantuan teknik ke KMW/Bappekot?
Jawaban: ya atau tidak
Kalau terlibat, sebutkan isi surat tersebut secara umum
9. Apa masalah yang dihadapi dalam pembuatan surat tersebut?
10. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
11. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
12. Apakah bantuan teknik yang diajukan saat Rembug Kesiapan Masyarakat sudah terlaksana dengan baik?
Jawaban: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan buktinya:
13. Apa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan teknik tersebut?
14. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
15. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- LURAH
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan peserta yang diundang dalam Rembug Kesiapan Masyarakat?
2. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan peserta perempuan?
3. Berapa persen peserta Rembug Kesiapan Masyarakat berasal dari kaum perempuan?
(Lampirkan daftar hadir Rembug Kesiapan Masyarakat)
4. Apa kendala yang dihadapi dalam penentuan peserta Rembug Kesiapan Masyarakat?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
7. Apakah peserta dapat memahami tentang konsep dan proses PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawaban: ya atau tidak

- Sebutkan buktinya:
8. Apakah sebagian besar peserta menyetujui pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan alasannya:
 9. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat?
 10. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
 11. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
 12. Apakah sebagian besar peserta terlibat dalam pembuatan surat permintaan bantuan teknik ke KMW/Bappekot?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
 13. Apa masalah yang dihadapi dalam pembuatan surat tersebut?
 14. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
 15. Apakah bantuan teknik yang diajukan saat Rembug Kesiapan Masyarakat sudah terlaksana dengan baik?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
 16. Apa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan teknik tersebut?
 17. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
 18. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP PENDAFTARAN RELAWAN

RESPONDEN

- PERWAKILAN WARGA MASYARAKAT
- PERWAKILAN WARGA PEREMPUAN

PERTANYAAN

1. Sebaiknya kriteria apa yang digunakan untuk menjadi seorang relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apakah relawan yang sudah direkrut sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan alasannya:
3. Apa masalah yang dihadapi dalam penentuan relawan?
4. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
5. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
6. Apa tugas pokok dan fungsi relawan?
7. Apakah relawan yang sudah direkrut sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- PERANGKAT KELURAHAN
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apakah relawan yang sudah direkrut sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan alasannya:
3. Berapa persen relawan yang terbentuk berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar relawan)
4. Apa masalah yang dihadapi dalam penentuan relawan?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

7. Apa tugas pokok dan fungsi relawan?

8. Apakah relawan yang sudah direkrut sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- RELAWAN

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi relawan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?

2. Apakah bapak/ibu sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai relawan dengan baik?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

3. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai relawan?

4. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?

5. Apakah upaya tersebut berhasil?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

TAHAP REFLEKSI KEMISKINAN

RESPONDEN:

- PERANGKAT KELURAHAN
- RELAWAN (TIM REFLEKSI KEMISKINAN)
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Upaya apa yang disepakati dalam menanggulangi kemiskinan di tempat bapak/ibu?
2. Langkah-langkah apa yang disepakati dalam melaksanakan upaya tersebut?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menentukan langkah-langkah tersebut?
4. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah upaya bapak/ibu sejauh ini berhasil?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

6. Apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sudah sesuai dengan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang telah disepakati?

Jawaban: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

TAHAP KAJIAN PEMETAAN SWADAYA

RESPONDEN:

- KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

PERTANYAAN:

1. Sebaiknya kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kelompok swadaya masyarakat?
2. Apakah kelompok swadaya masyarakat tempat bapak/ibu berada sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Apakah kelompok swadaya masyarakat tempat bapak/ibu berada sudah memiliki visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
Jawaban: ya atau tidak (buktinya dilampirkan)
4. Apa kendala yang dihadapi saat merumuskan visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- LURAH
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan dalam penentuan Tim Pemetaan Swadaya RW?
2. Apakah penentuan Tim Pemetaan Swadaya RW sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Berapa persen Tim Pemetaan Swadaya yang terbentuk berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar Tim Pemetaan Swadaya RW)
4. Apa masalah yang ditemui dalam penentuan Tim Pemetaan Swadaya RW?
5. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

6. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
7. Kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kelompok swadaya masyarakat?
8. Apakah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
9. Berapa persen dari Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbentuk berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar Kelompok Swadaya Masyarakat)
10. Apa kendala dalam menentukan kelompok swadaya masyarakat?
11. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi masalah tersebut?
12. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
13. Apakah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk sudah memiliki visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
Jawaban: ya atau tidak (buktinya dilampirkan)
14. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok yang sudah ada?
15. Kesulitan apa yang dihadapi oleh kelompok swadaya masyarakat dalam merumuskan visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
16. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kesulitan tersebut?
17. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- TIM PEMETAAN SWADAYA RW

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kelompok swadaya masyarakat?
2. Apakah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

3. Berapa persen dari Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbentuk berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan bukti Daftar Kelompok Swadaya Masyarakat)
4. Apa kendala dalam menentukan kelompok swadaya masyarakat?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
7. Apakah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk sudah memiliki visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
Jawaban: ya atau tidak (buktinya dilampirkan)
8. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok yang sudah ada?
9. Kesulitan apa yang dihadapi oleh kelompok swadaya masyarakat dalam merumuskan visi, misi, tujuan, serta aturan dasar kelompok?
10. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kesulitan tersebut?
11. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM RW

RESPONDEN:

- WARGA MASYARAKAT

PERTANYAAN

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Tim Pengendali Program RW dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali Program RW:
2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam pemilihan anggota Tim Pengendali Program RW dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan proses pemilihan Tim Pengendali Program RW tersebut.
3. Sebaiknya kriteria apa yang digunakan untuk membentuk Tim Pengendali Program RW?
4. Apakah Tim Pengendali Program RW yang terbentuk sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
5. Berapa jumlah anggota Tim Pengendali Program RW yang bapak/ibu ketahui?
Jawab:
Sebutkan:
6. Apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan Tim Pengendali Program RW?
7. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
8. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- RELAWAN
- FASILITATOR
- PERANGKAT RW

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan untuk membentuk Tim Pengendali Program RW dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?

2. Apakah Tim Pengendali Program RW yang terbentuk sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Berapa persen anggota Tim Pengendali Program RW yang berjenis kelamin perempuan?
(Lampirkan daftar anggota Tim Pengendali Program RW)
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan Tim Pengendali Program RW?
5. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawaban: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- TIM PENGENDALI PROGRAM RW

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali Program RW dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apakah bapak/ibu sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Tim Pengendali Program RW?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Apa kendala bapak/ibu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Tim Pengendali Program RW?
4. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP PENGUATAN LEMBAGA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

RESPONDEN:

- TIM PENGENDALI PROGRAM RW

PERTANYAAN:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas pokok dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
Jawab: ya atau tidak
Kalo ya, sebutkan:
2. Apa kelemahan dan kelebihan BKM yang lama? Sebutkan:
Kelemahan:
Kelebihan:
3. Bercermin pada kelemahan dan kelebihan BKM yang lama, menurut Bapak/Ibu sebaiknya kriteria apa yang digunakan untuk memilih anggota BKM?
4. Apakah anggota BKM terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
5. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam pemilihan anggota BKM?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tanggapan bapak/ibu terhadap proses pemilihan anggota BKM tersebut.

RESPONDEN:

- LURAH
- RELAWAN
- FASILITATOR
- PERANGKAT KELURAHAN (LPM)
- DEWAN KELURAHAN

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apa kelemahan dan kelebihan BKM yang lama? Sebutkan:
3. Bercermin pada kelemahan dan kelebihan BKM yang lama, kriteria apa yang digunakan untuk memilih anggota BKM?
4. Apakah anggota BKM terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?

Jawab: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

5. Berapa persen anggota BKM terpilih berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar anggota BKM)
6. Apa kendala yang dihadapi saat pemilihan anggota BKM?
7. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
8. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?

Jawab: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- ANGGOTA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan?
2. Apa kelemahan dan kelebihan BKM yang lama? Sebutkan:
3. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam penyempurnaan AD/ART BKM?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan proses penyempurnaan AD/ART BKM yang terjadi:
4. Apa kendala yang dihadapi dalam penyempurnaan AD/ART BKM?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PARTISIPATIF TINGKAT RW

RESPONDEN:

- PERWAKILAN WARGA MASYARAKAT
- PERWAKILAN WARGA PEREMPUAN
- PERANGKAT RW

PERTANYAAN:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tugas pokok dan fungsi TPP RW:
2. Sebaiknya kriteria apa yang digunakan untuk memilih Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW?
3. Apakah TPP RW terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
4. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam pemilihan TPP RW?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tanggapan bapak/ibu terhadap proses pemilihan TPP RW:

RESPONDEN:

- FASILITATOR
- KETUA RW

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW?
2. Apakah TPP RW terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Berapa persen anggota TPP RW yang terpilih berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar anggota TPP RW)
4. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam pemilihan TPP RW?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF (TPP) RW

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW?
2. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (RTPK) dan program tahunan?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam penyusunan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (RTPK) dan program tahunan?
4. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN

RESPONDEN:

- TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF (TPP) RW
- PERWAKILAN WARGA
- PERWAKILAN WARGA PEREMPUAN
- PERANGKAT KELURAHAN

PERTANYAAN:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tugas pokok dan fungsi TPP Kelurahan:
2. Sebaiknya kriteria apa yang digunakan untuk memilih Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan?
3. Apakah TPP Kelurahan terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
4. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam pemilihan TPP Kelurahan?
Jawab: ya atau tidak
Kalau ya, sebutkan tanggapan bapak/ibu terhadap proses pemilihan TPP Kelurahan:

RESPONDEN:

- BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
- LURAH
- DEWAN KELURAHAN
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan?
2. Apakah TPP Kelurahan yang terpilih sudah sesuai dengan kriteria tersebut?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

3. Berapa persen anggota TPP Kelurahan yang terpilih berasal dari kalangan perempuan?
(Lampirkan daftar anggota TPP Kelurahan)
4. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam pemilihan TPP Kelurahan?
5. Apa upaya bapak/ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
6. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF KELURAHAN

PERTANYAAN:

1. Apa tugas pokok dan fungsi Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan?
2. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:
3. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)?
4. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah upaya bapak/ibu tersebut sejauh ini berhasil?
Jawab: ya atau tidak
Sebutkan buktinya:

TAHAP MUSRENBANG KELURAHAN

RESPONDEN:

- LURAH
- DEWAN KELURAHAN
- LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- FASILITATOR

PERTANYAAN:

1. Apakah PJM Pronangkis sudah ditetapkan sebagai program kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam penyelenggaraan musrenbang kelurahan?
3. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?

Jawab: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

RESPONDEN:

- PERWAKILAN WARGA MASYARAKAT
- PERWAKILAN WARGA PEREMPUAN
- TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF RW

PERTANYAAN:

1. Apakah PJM Pronangkis sudah ditetapkan sebagai program kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam musrenbang kelurahan?
3. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam mengikuti musrenbang kelurahan?
4. Apa upaya bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
5. Apakah upaya tersebut sejauh ini berhasil?

Jawab: ya atau tidak

Sebutkan buktinya:

LAMPIRAN 2 TABULASI HASIL SURVEI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
PERKOTAAN DI DKI JAKARTA

| TAHAP REMBUG KESIAPAN MASYARAKAT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemahaman responden tentang tujuan dan proses PNPM Mandiri |
| <p>KETUA RW/RT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Ketua RW/RT terhadap tujuan dan proses PNPM Mandiri dalam kenyataannya bervariasi. Bagi Lembaga kepemimpinan masyarakat ini, terutama yang aktif sebagai “relawan” dalam kepengurusan TPP RW dan KSM relatif tinggi, sebaliknya yang tidak aktif rendah. - Pemahaman Ketua RW/RT juga sangat tergantung keaktifan mereka dalam kegiatan program ini. Umumnya mereka yang faham itu adalah mereka yang terlibat langsung dalam organisasi PNPM Mandiri di tingkat wilayah Rukun Warga/Tetangga. Sedangkan yang tidak, dan adakalanya Ketua RW/RT itu baru hampir tidak paham sama sekali. Tetapi pada dasarnya mereka membantu proses pelaksanaan kegiatan program ini, misalnya seperti pembentukan anggota Panitia KSM, memberi informasi tentang peta potensi warga masyarakat kepada pengurus PNPM Mandiri di wilayahnya. - Pemahaman Ketua RW/RT tentang tujuan PNPM Mandiri cenderung menekankan pada upaya pemerintah dalam pembangunan jalan lingkungan, perbaikan saluran air got dan bangunan fisik. Mereka belum faham secara baik bahwa tujuan PNPM Mandiri merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. - Pemahaman tentang proses masih rendah, karena mereka memang tidak mendapat pengetahuan melalui pelatihan khusus tentang proses PNPM Mandiri tersebut. |
| <p>MASYARAKAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua anggota masyarakat memahami tujuan dan proses PNPM Mandiri. Untuk memahami tujuan dan proses program itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu, karena mereka merupakan pemanfaat proyek. Upaya melibatkan anggota masyarakat secara massif telah dilakukan oleh Tim Fasilitator, namun dalam kenyataan ada kendala, yaitu kesadaran sebagian besar anggota masyarakat terhadap program ini masih rendah. Berbagai faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, sebagian bersumber dari persepsi masyarakat terhadap program ini. Menurut pandangan sebagian besar masyarakat, terutama di lapisan kelas bawah, program PNPM Mandiri dihubungkan dengan kegiatan menghabiskan dana proyek sesuai dengan persyaratan teknis administratif yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri, sehingga dirasakan bahwa seringkali program ini tidak tepat sasaran, yaitu menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. - Pemahaman masyarakat tentang tujuan PNPM Mandiri tergambar dari tingkat pengetahuan mereka terhadap program ini. Misalnya, masyarakat sebagian besar menilai dan mempertanyakan Program PNPM Mandiri, apakah sama dengan program BLT. Bagi yang mulai mengerti, mengindentikkan program ini dengan kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana lingkungan) bukan merupakan upaya penanganan kemiskinan secara langsung dan berkelanjutan. - Tingkat pemahaman sebagian besar masyarakat tentang tujuan PNPM Mandiri cenderung rendah, karena tingkat pengetahuan mereka tentang program ini cenderung sekedar tahu saja, kecuali sekelompok kecil anggota masyarakat yang aktif terlibat di dalam kegiatan ini, mereka itu adalah relawan-relawan pada tingkat RT/RW dan Kelurahan. - Sedangkan tingkat pemahaman mereka terhadap proses PNPM Mandiri rendah sekali. Ini karena mereka tidak terlibat dalam kegiatan ini. Sikap mereka terhadap proses kegiatan ini cenderung curiga atau tidak percaya terhadap tujuan program PNPM mandiri di wilayah ini. Pandangan mereka terhadap relawan PNPM Mandiri cenderung curiga, karena penilaian mereka selama ini adalah setiap program bantuan pemerintah yang banyak menerima manfaat adalah para pengelola bantuan itu, bukan anggota masyarakat. |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PERANGKAT KELURAHAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paham, apalagi 20% sumber dana program ini berasal dari APBD DKI Jakarta - Pada umumnya mereka paham tujuan PNPM Mandiri, namun pengetahuannya tentang proses PNPM Mandiri relatif terbatas. |
| <p>FASILITATOR:</p> <p>Konsep dan Proses PNPM Mandiri hanya dipahami oleh anggota masyarakat yang menjadi Relawan saja, mereka inilah yang aktif dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, sedangkan sebagian besar anggota masyarakat yang menjadi target umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik tujuan dan proses PNPM Mandiri.</p> |
| <p>2. Penerimaan/penolakan responden terhadap PNPM Mandiri Perkotaan</p> |
| <p>KETUA RW/RT:</p> <p>Pada umumnya Ketua RW/RT menerima program ini dilaksanakan di wilayah lingkungan masyarakatnya, karena lembaga kepemimpinan masyarakat ini tahu bahwa tujuan program ini sejalan dengan tujuan program Pemerintah DKI Jakarta di bidang pemberdayaan masyarakat. Penerimaan itu terlihat dari sikap Ketua RW/RT serta keterlibatan mereka di setiap siklus kegiatan ini di lapangan.</p> |
| <p>MASYARAKAT:</p> <p>Sikap dan penilaian anggota masyarakat yang menjadi target terhadap program ini bervariasi. Sebagian ada yang menerima secara terang-terangan. Ini tampak dari sikap mereka aktif terlibat menyumbang tenaga dalam kegiatan pembangunan fisik di lingkungannya, sedangkan anggota masyarakat yang tidak menjadi target terlibat dalam menyumbang dana untuk membangun kegiatan fisik tersebut. Tidak teridentifikasi secara jelas adanya sikap masyarakat yang menolak program ini. Namun dari hasil wawancara dengan Pengurus LKM atau TPP-RW terungkap bahwa sikap penolakan masyarakat itu teridentifikasi dari sikap mereka yang tidak percaya terhadap para relawan.</p> |
| <p>PERANGKAT KELURAHAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Perangkat kelurahan cenderung sedang. Ini terlihat dari tidak adanya upaya memfasilitasi kegiatan program ini, misalnya dalam pengadaan ruang sekretariat PNPM Mandiri di Kelurahan. Penolakan secara langsung tidak ada, namun adakalanya untuk meminta tanda tangan Lurah sebagai legalitas laporan tidak lancar. - Dukungan terlihat dari pemberian fasilitas kantor kelurahan untuk mengadakan rapat-rapat LKM. - Penerimaan Perangkat kelurahan terhadap Pelaksanaan Program PNPM Mandiri cenderung kurang. Ini terlihat jarang Lurah memantau pelaksanaan dan hasil program PNPM Mandiri di wilayah ini. Adakalanya Pengurus LKM kesulitan mendapat tandatangan Lurah jika diperlukan terutama yang terkait dengan legalitas laporan. |
| <p>FASILITATOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat kurang antusias menerima program PNPM Mandiri. Ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat PNPM Mandiri. Gejala ini sudah terlihat pada tahap Rembung Kesipan masyarakat sampai akhir siklus kegiatan pada akhir tahun. - Di samping kurangnya antusias masyarakat juga karena keterbatasan waktu untuk terlibat secara aktif. Hal lainnya adalah karena tidak paham secara jelas tentang konsep dan proses PNPM Mandiri. Dan yang lebih penting lagi rendahnya kepedulian masyarakat terhadap program ini. |

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pendapat responden tentang penyelenggaraan Rembug Kesiapan Masyarakat, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan |
| | <p>KETUA RW/RT: Ketua RW/Ketua RT mendukung penyelenggaraan RKM, karena mereka mengetahui bahwa penyelenggaraan itu bertujuan untuk membentuk Lembaga LKM, TPP-RW, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sekaligus sebagai tahapan untuk penerimaan dana dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Kendala: Partisipasi anggota masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan RKM rendah, sehingga sulit menggerakkan masyarakat terlibat di dalamnya. Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan tujuan dari PNPM Mandiri kepada masyarakat.</p> |
| | <p>MASYARAKAT: Pendapat Ketua RW/RT di atas mewakili pendapat anggota masyarakat pada umumnya.</p> |
| | <p>PERANGKAT KELURAHAN: Tidak ada komentar, karena mereka tidak mengetahui secara faktual tentang penyelenggaraan RKM.</p> |
| | <p>FASILITATOR: Penyelenggaraan Rembug Kesiapan Masyarakat sangat menentukan siklus kegiatan PNPM Mandiri pada tahap lebih lanjut, karena melalui mekanisme inilah dibangun kesepakatan bersama di kalangan tokoh masyarakat dan warga miskin setempat untuk menyatakan kesiapan atau menolak melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan adanya mekanisme rembug masyarakat maka fasilitator akan terbantu dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara nyata dan sekaligus dapat dikenali apa yang menjadi keluhan masyarakat. Namun proses pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat dalam pelaksanaannya tidak mudah karena ada beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat miskin untuk aktif mengikuti rembug tersebut. Umumnya mereka tidak cukup waktu. Waktu mereka lebih banyak digunakan untuk bekerja mencari nafkah keluarganya. Di samping itu antusiasme mereka juga kurang, akibat lebih lanjut adalah rembug masyarakat dihadiri oleh para elit-elit masyarakat setempat pada tingkat RW.</p> |
| 4. | Keterlibatan responden dalam pengajuan bantuan teknik ke KMW |
| | <p>KETUA RW/RT: Tidak terlibat secara langsung, kecuali memberi masukan sesuai kebutuhan yang diminta oleh masyarakat.</p> |
| | <p>MASYARAKAT: Masyarakat pada umumnya tidak terlibat, karena mereka tidak mengerti prosesnya, dan juga tidak perlu, kecuali anggota masyarakat yang menjadi relawan dalam organisasi LKM dan TPP-RW.</p> |
| | <p>PERANGKAT KELURAHAN: Tidak terlibat</p> |
| | <p>FASILITATOR: Masyarakat, dalam hal ini para Relawan masih didampingi dalam proses bantuan teknik, seperti pembuatan proposal, penyusunan RAB, pembuatan laporan akhir, pembuatan form, dan juga pelatihan teknis lainnya, seperti latihan kepemimpinan dan manajerial dalam pengelolaan kegiatan.</p> |
| | <p>LURAH: Tidak ada pendapat, karena secara faktual dan administratif keterlibatan lurah tidak diperlukan. Pengorganisasian kegiatan PNPM bersifat mandiri.</p> |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pendapat responden tentang keberhasilan bantuan teknik, termasuk kendala yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan |
| | KETUA RW/RT: Tidak ada pendapat, karena Ketua RW/RT tidak banyak mengetahui secara teknis proses dan prosedurnya. |
| | MASYARAKAT: Pada umumnya masyarakat tidak terlibat karena itu mereka tidak bisa memberi pendapat. Tetapi masyarakat yang menjadi Relawan berpendapat bahwa bantuan teknik yang diberikan oleh Fasilitator telah membantu kemampuan dan kemandirian mereka dalam mengelola suatu kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakatnya. Mereka mulai mengerti tentang proses perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan. Wawasan dalam berorganisasi menjadi luas. Upaya yang dilakukan adalah selalu berkonsultasi kepada Fasilitator jika ada hal teknis administratif dan fisik bangunan yang kurang jelas. Kendala yang dihadapi adalah adakalanya Fasilitator kurang aktif datang wilayah fokus kegiatan untuk mendampingi. |
| | PERANGKAT KELURAHAN: Tidak ada pendapat |
| | FASILITATOR: Pada umumnya, para Relawan yang aktif dalam organisasi LKM, TPP-RW sudah mengerti teknik dan prosedur mengelola suatu kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakat. Mereka sudah memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen pengelolaan pembangunan. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kemandirian. Mereka masih perlu didampingi. Upaya yang dilakukan adalah memberi pelatihan secara berkala kepada masyarakat yang aktif dalam PNPM Mandiri Perkotaan. |
| 6. | Pendapat responden tentang penentuan peserta Rembug Kesiapan Masyarakat, termasuk penentuan peserta perempuan |
| | KETUA RW/RT: Penentuan peserta RKM sesuai dengan pedoman yang ada, namun kriteria penentuan peserta RKM dalam prakteknya sulit dilaksanakan, karena sebagian besar warga, termasuk perempuan kurang peduli terhadap kegiatan yang sifatnya sukarela, orientasi mereka uang. Jadi dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi RW fokus. |
| | MASYARAKAT: Mereka kurang antusias karena kondisi sosial-ekonomi keluarga |
| | PERANGKAT KELURAHAN: Tidak ada pendapat |
| | FASILITATOR: Kriteria sudah sesuai dengan pedoman, namun dalam praktek bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat setempat. |
| | LURAH: Secara teknis Lurah tidak faham, karena itu tidak memberikan penilaian. |
| TAHAP PENDAFTARAN RELAWAN | |
| 1. | Pendapat responden tentang proses pendaftaran relawan, termasuk kriteria yang digunakan, serta penerimaan peserta perempuan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| | PERANGKAT KELURAHAN: Tidak ada pendapat |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FASILITATOR: Tidak ada masalah dalam proses pendaftaran relawan, prosesnya berawal dari bawah. Fasilitator tidak ikut mengintervensinya. Memang diakui bahwa Ketua RT sangat berperan dalam menentukan proses dan menentukan kriteria peserta relawan, karena mereka yang mengenal secara riil anggota masyarakatnya, karena itu pertimbangan hubungan kedekatan, kepercayaan mempengaruhi pula proses pendaftaran relawan tersebut. Kendala: masyarakat kurang antusias mendaftar. Upaya yang dilakukan adalah: Ketua RT menunjuk langsung para calon relawan, termasuk dia sendiri menjadi relawan.</p> |
| <p>MASYARAKAT: Masyarakat yang tidak bersedia menjadi relawan tidak memberikan penilaian (pasif).</p> |
| <p>2. Pemahaman responden tentang tugas pokok dan fungsi sebagai relawan</p> |
| <p>PERANGKAT KELURAHAN: Lurah tidak memiliki pengetahuan tentang TUPOKSI relawan, karena alasan itu dia tidak faham</p> |
| <p>FASILITATOR: Tingkat pemahaman baik</p> |
| <p>MASYARAKAT: Tidak ada pendapat</p> |
| <p>RELAWAN: Faham dan mampu melaksanakan.</p> |
| <p>TAHAP REFLEKSI KEMISKINAN</p> |
| <p>1. Pendapat responden tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan</p> |
| <p>PERANGKAT KELURAHAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu penanggulangan kemiskinan. - Baik bagi pemberdayaan masyarakat. - PNPM baik bagi kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat komunitas. |
| <p>FASILITATOR: Membantu upaya pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.</p> |
| <p>RELAWAN: Beguna bagi peningkatan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan mendorong tumbuhnya semangat gotong royong, kebersamaan, serta peduli sesama.</p> |
| <p>TAHAP KAJIAN PEMETAAN SWADAYA</p> |
| <p>1. Pendapat responden tentang penentuan KSM, termasuk kriteria yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan</p> |
| <p>LURAH Tidak ada pendapat, karena Lurah tidak terlibat dalam pembentukan dan penentuan kriteria orang-orang yang terkelompok dalam KSM</p> |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>KSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan anggota KSM sesuai pedoman (SOP). Kendala yang dihadapi terkait dengan keterbatasan dana dan lambatnya pencairan dana dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan fisik lingkungan. - Penentuan KSM tidak ada masalah yang berarti, termasuk kriteria orang-orang yang terlibat di dalam wadah KSM. - Penentuan KSM sesuai prosedur yang diatur dalam buku pedoman. Dilaksanakan pada wilayah fokus pada tingkat RT. Kendala terkait dengan ketersediaan dana, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. |
| <p>TIM PEMETAAN SWADAYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan KSM sesuai prosedur (SOP) dan kriteria yang ada dalam buku pedoman. Kendalanya, tidak banyak warga yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat miskin. - Penentuan KSM mengikuti ketentuan pedoman. |
| <p>2. Pendapat responden tentang visi, misi, dan aturan dasar KSM</p> |
| <p>FASILITATOR: Pengorganisasi KSM tidak melembaga, dan tidak ada perumusan visi, misi, namun ada tujuan dan TUPOKSI dalam proposal kegiatan.</p> |
| <p>LURAH: Lurah tidak terlibat dalam proses penentuan KSM. Tidak ada pendapat.</p> |
| <p>KSM: Anggota KSM tidak memahami VISI dan MISI, karena fungsi mereka terbatas pada pelaksanaan teknis kegiatan saja di lapangan. Sedangkan program dan skala prioritas sudah dirumuskan pada tingkat TPP RW.</p> |
| <p>TIM PEMETAAN SWADAYA: Aturan dasar KSM mengacu pada Anggaran Dasar/Rumah Tangga organisasi LKM.</p> |
| <p>TAHAP PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM RW</p> |
| <p>1. Pendapat responden tentang proses pembentukan Tim Pengendali Program RW, termasuk kriteria yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan</p> |
| <p>PERANGKAT RW: Pembentukan didasarkan kesepakatan warga, termasuk kriterianya. Hampir tidak ada kendala dalam pembentukan TPP-RW.</p> |
| <p>FASILITATOR Mekanisme pembentukan TPP mengikuti ketentuan pedoman dan dilaksanakan di Tingkat RW dengan kriteria yang ditentukan melalui musyawarah/kesepakatan warga.</p> |
| <p>RELAWAN: Pembentukan sesuai prosedur dalam pedoman.</p> |
| <p>MASYARAKAT: Jawaban sudah terwakili oleh relawan. Sedangkan warga masyarakat biasa tidak mengerti TPP-RW. Tidak ada pendapat.</p> |
| <p>TIM PENGENDALI PROGRAM RW: Proses pembentukan berlangsung sesuai kesepakatan warga dan berpedoman pada ketentuan yang ada dalam kegiatan PNPM.</p> |
| <p>2. Pendapat responden tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali Program RW</p> |
| <p>PERANGKAT RW: Membantu kelancaran kegiatan PNPM di Tingkat RW/RT.</p> |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASILITATOR: - Sudah sesuai TUPOKSI. - Dapat mengawasi efektifitas kegiatan KSM. |
| RELAWAN: Sesuai TUPOKSI |
| MASYARAKAT: Tidak ada pendapat |
| TIM PENGENDALI PROGRAM RW: Sesuai TUPOKSI |
| TAHAP PENGUATAN LEMBAGA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) |
| 1. Pendapat responden tentang kelemahan dan kelebihan BKM lama |
| KELURAHAN: Tidak ada pendapat |
| FASILITATOR: Tidak faham maksud pertanyaan |
| RELAWAN: Tidak tahu |
| ANGGOTA BKM: Tidak tahu |
| TIM PENGENDALI PROGRAM RW: Tidak tahu |
| 2. Pendapat responden tentang proses pemilihan anggota BKM, termasuk kriteria yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| KELURAHAN: Tidak tahu |
| FASILITATOR: Prinsip dan mekanisme sama dengan LKM |
| RELAWAN: Tidak tahu |
| ANGGOTA BKM: Tidak ada jawaban |
| TIM PENGENDALI PROGRAM RW: Tidak tahu |
| 3. Pendapat responden tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKM |
| KELURAHAN: Tidak tahu |
| FASILITATOR: Tidak tahu |
| RELAWAN: Tidak tahu |
| ANGGOTA BKM: Tidak tahu |
| TIM PENGENDALI PROGRAM RW: Tidak tahu |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Keterlibatan responden dalam penyempurnaan AD/ART BKM, termasuk kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| ANGGOTA BKM: Tidak ada jawaban |
| TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PARTISIPATIF |
| 1. Pendapat responden tentang proses pemilihan Tim Perencanaan Partisipatif Tingkat RW, termasuk kriteria yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| TPP TINGKAT RW: Proses pemilihan Tim Perencanaan Partisipatif diawali dengan pemilihan secara terbuka, yang anggotanya dipilih dari wakil TPP-RW. Kriteria yang digunakan adalah memiliki keinginan untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan secara sukarela dan mau bekerjasama dan berkomunikasi dengan masyarakat dan Ketua RW/RT. Kendala yang ada adalah dalam rapat menyusun program yang akan dilaksanakan, terutama terkait dengan upaya menggali ide dan aspirasi masyarakat serta merumuskannya secara tepat. Upaya yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan Pendamping. |
| MASYARAKAT: Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pemilihan. |
| FASILITATOR: Pemilihan di dasarkan pada kriteria sukarela dan peduli terhadap masalah sosial masyarakat, dan melibatkan kalangan perempuan dalam keanggotaannya. Kendala: Partisipasi anggota masyarakat rendah dalam kegiatan ini. Langkah penanggulangan dengan memberikan pemahaman kembali kepada anggota masyarakat tentang tugas TIM TP. |
| 2. Pendapat responden tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Perencanaan Partisipatif Tingkat RW |
| TPP TINGKAT RW: Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan anggota masyarakat kepada pemerintah melalui usulan program nyata di lingkungan masyarakat. Namun dalam kenyataan tidak selalu program yang disetujui pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat sesungguhnya. |
| MASYARAKAT: Tidak tahu |
| FASILITATOR: Sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan kalau ada yang menjadi kendala difasilitasi oleh Fasilitator. |
| 3. Keterlibatan responden dalam penyusunan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (RTPK) dan program tahunan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| TPP TINGKAT RW: Tingkat keterlibatan relatif tinggi. Kendala: dalam hal ketersediaan waktu untuk menghadiri rapat program di Kelurahan. Karena itu sering pertemuan diadakan malam hari. |
| TAHAP MUSRENBANG PJM PRONANGKIS KELURAHAN |
| 1. Pendapat responden tentang pelaksanaan musrenbang Kelurahan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan |
| TPP TINGKAT KELURAHAN: Pelaksanaan disesuaikan dengan Buku pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis. Penyusunan Program didasarkan pada visi, misi dan strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan setempat. Kendala: partisipasi warga rendah dan ada intervensi dari pemerintah untuk menentukan skala prioritas. Upaya yang dilakukan: berkonsultasi dengan konsultan (Faskel). |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TPP TINGKAT RW: Tidak ada jawaban.</p> |
| <p>KELURAHAN: Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang dan memimpin pelaksanaan rapat.</p> |
| <p>FASILITATOR: Pelaksanaan Musrenbang PNPM di Kelurahan sudah ditetapkan sebagai program tahunan Kelurahan. Kendala: Lemahnya sinkronisasi usulan di PJM dengan usulan yang masuk ke Musrenbang. Ada perangkat kelurahan yang belum faham peraturan teknis dan aturan MUSRENBANG; sosialisasi Musrenbang Kelurahan dari Pemerintah Kota kurang intens.</p> |